

PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Edi Wibowo

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Policy of national development has very strategic and important function and role to attainment of target national development. The successful of national development do not only determined by governmental role, but also having to support by role of private sector and society to development stakeholders.

Important role differ from people economics is in absorption of labor. Problem lacking of capital faced by Indonesia, can be solved with solid investment pattern of labor, because can create the more business unit as well as opportunity of job, so that can solve problem unemployment.

Keywords: *unemployment, economic planning, economic development, national development*

PENGERTIAN PERENCANAAN EKONOMI

Sebenarnya belum ada kata sepakat di antara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi. Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat.

Tujuan perencanaan ekonomi adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Dan perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu :

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu.

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan adalah:

1. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
4. Usaha perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan, sering disebut sebagai *distributive justice*.
6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka kerja makro.
Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
4. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijakan sektoral lainnya. Berbagai kebijakan tersebut perlu untuk dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
5. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
6. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan fungsi-fungsi perencanaan adalah sbb:

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Dari sudut pandang ekonomi, alasan perlunya perencanaan adalah :

1. Agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien.
2. Agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur.

PERLUNYA STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut berarti perlu juga meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan dan investasi.

Untuk negara Indonesia peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah, tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah. Akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan “lingkaran setan kemiskinan”.

Salah satu cara untuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu pembangunan yang terencana.

Ada dua (2) cara untuk memotong lingkaran setan tersebut:

1. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut “Industrialisasi yang diproteksi”.
2. Dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut “Industrialisasi dengan kemampuan sendiri.”.

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut adalah :

1. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
2. Untuk mengurangi pengangguran.

Jadi singkat kata bahwa perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB dan Negara Indonesia (khususnya). Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan Ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pemerintahan untuk mempengaruhi, mengarahkan serta mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, Konsumsi, Investasi, Tabungan dan lain-lain).

Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa mencakup keseluruhan (komprehensif) maupun secara parsial (sebagian).

PROSES PERENCANAAN EKONOMI

Proses perencanaan ekonomi melalui beberapa tahap dan masing-masing tahap tersebut sudah ditentukan dahulu apa yang ingin dicapai pada setiap tahap tersebut.

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, di antaranya: untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya.

2. Mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih dan lain-lain.
3. Memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti : jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang: kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi dan lain-lain.
4. Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (*welfare function*) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional.

SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN SUATU PERENCANAAN

Kunci keberhasilan suatu perencanaan biasanya memerlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi perencanaan
Sebagai badan pelaksana perencanaan yang terorganisir dengan tepat.
2. Data Statistik
Perencanaan yang baik membutuhkan analisis yang menyeluruh tentang potensi sumberdaya yang dimiliki, beserta kekurangannya.
3. Tujuan
Perencanaan harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai.
4. Penetapan sasaran dan prioritas
Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai suatu tujuan dibuat secara makro dan sektoral.
5. Mobilisasi Sumberdaya
Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia.
6. Keseimbangan dalam perencanaan
Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindari kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.
7. Sistem Administrasi yang Efisien
Administrasi yang baik dan efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan.
8. Kebijakan pembangunan yang tepat
Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya.
9. Administrasi yang ekonomis
Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintah.

10. Dasar pendidikan
Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.
11. Teori konsumsi.
Salah satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi.
12. Dukungan masyarakat.
Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis.

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita mencermati beberapa dokumen yang selama ini dijadikan landasan/rujukan strategi dan kebijakannya. Dalam GBHN termuat tentang Pola Umum dan Pola Dasar Jangka Panjang, yang sasaran utamanya adalah “terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sedangkan titik berat dalam rencana pembangunan jangka panjang tersebut adalah “pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat”.

Kalu kita mencermati tujuan dan sasaran pembangunan tersebut sebetulnya sangat abstrak, sehingga tidak mudah untuk menguji apakah sasaran tersebut sudah terpenuhi atau belum. Namun demikian dengan menggunakan berbagai indikator pembangunan ekonomi yang umum digunakan, terlihat adanya keberhasilan pembangunan yang signifikan dalam bidang ekonomi, misalnya:

1. Laju pertumbuhan ekonomi selama PJP I rata-rata 6,8% per tahun.
2. Penduduk miskin berkurang, dari 40,1% awal orde baru menjadi 13,73% tahun 1993.
3. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke dominasi industri.
4. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 49,3% (tahun 1969) menjadi hanya 18,5% (tahun 1993).
5. Kontribusi sektor industri meningkat dari 9,26% menjadi 22,3% untuk kurun waktu yang sama.
6. Perdagangan luar negeri meningkat pesat, ekspor meningkat 42 kali lipat dan impor meningkat 3 kali selama PJP I tersebut.

Selain indikator tersebut, masih banyak indikator lain yang bisa dipakai sebagai gambaran yaitu; pengendalian inflasi, konsumsi energi, cadangan devisa, investasi dan lain-lain. Yang kesemuanya itu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik. Namun demikian memang tidak semuanya berhasil seperti yang kita harapkan, karena masih ada beberapa kondisi yang kurang berhasil yaitu:

1. Kesenjangan pendapatan antar masyarakat masih tinggi.
2. Hutang luar negeri meningkat.
3. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem
4. Pemborosan anggaran dan korupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan sebagainya.

Berbagai penyakit ekonomi tersebut tidak bisa dihilangkan/dikendalikan, yang akhirnya memberi kontribusi pada runtuhnya kekuasaan orde baru (1998) dengan meninggalkan situasi ekonomi yang dilanda krisis, yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya pulih.

Dalam pemerintahan sekarang, sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dilakukan, dokumen pembangunan pun berubah.

Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat untuk periode 20 tahun ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin meningkat dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam.

Pada bagian lain dikemukakan dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat. Sedangkan arah pembangunan jangka panjang (2005-2025) Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005 –2025.

Visinya adalah :

“Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan Misinya adalah :

1. Mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.
 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
- Visi dan Misi ini memang sejalan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka disusun sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Terbangunya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
2. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US \$ 6.000, dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 5 persen

3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Jika kita melihat visi dan misi pembangunan di atas, maka tidak ada yang perlu dipertanyakan sepanjang visi-misi tersebut betul-betul menjadi acuan kebijakan dan aksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Yang menjadi permasalahan adalah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ada prakondisi yang harus dicapai lebih dulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*clean government and good governance*).

Sepanjang prakondisi tersebut belum disiapkan, akan sangat sulit bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita luhur pembangunan tersebut. Dan sayangnya lagi di Indonesia, jika dilihat dari berbagai indikator yang ada, hal tersebut masih jauh dari harapan.

Masalah pemerintahan yang bersih yang menjadi salah satu tema gerakan reformasi, ternyata masih dalam angan-angan. Berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas dalam birokrasi, legislatif, maupun dalam kekuasaan yudikatif. Riset-riset internasional menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masuk dalam jajaran atas, baik level Asia maupun dunia.

Saat ini praktik-praktik korupsi masih terus berlanjut, praktik tersebut terjadi dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah-daerah, BUMN-BUMN, DPR dan DPRD, Badan-Badan Yudikatif serta lembaga-lembaga non departemen yang dibentuk oleh pemerintah.

Bahkan ada sinyalemen terjadinya korupsi pada lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara. Hanya saja tidak mudah membawa kasus tersebut sampai ke lembaga peradilan karena sulitnya mencari bukti kasus tersebut, di samping adanya “permainan” di lembaga peradilan itu sendiri. Akibatnya masyarakat juga ragu-ragu untuk memunculkan kasus korupsi yang diketahuinya karena khawatir justru menjadi bumerang bagi dirinya.

Sinyalemen korupsi di bidang perpajakan, misalnya sudah diketahui secara luas, namun ketika ada yang meraba-raba dengan menunjukkan estimasi angka-angka korupsi di sektor tersebut, ia harus berhadapan dengan somasi dari Dirjen Pajak sehingga harus meminta maaf secara terbuka karena tidak mempunyai data konkrit tentang manipulasi dana pajak tersebut. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka sulit bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Saat ini terdapat kesan yang cukup kuat bahwa puncak pemerintahan mempunyai “*political will*”, untuk memberantas korupsi. Namun demikian langkah untuk itu ternyata tidak mudah. Jejaring korupsi yang sudah merasuk di setiap lini birokrasi, legislatif dan yudikatif dan juga BUMN-BUMN membuat upaya itu berhadapan dengan resistensi yang menumpulkan kebijakan-kebijakan anti korupsi tersebut.

Tali-temali korupsi yang melibatkan antara oknum berbagai institusi (sehingga dilukiskan oleh seorang ustadz sebagai “korupsi berjamaah”) juga

menyulitkan pemberantasnya, karena adanya keinginan melindungi korp atau karena bisa mengancam stabilitas pemerintahan.

Pemeriksaan kasus Korupsi di KPU misalnya, disinyalir terkait dengan oknum-oknum di DPR, BPK, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, Rekanan-rekanan bisnisnya dan mungkin akan memunculkan oknum dari institusi lainnya.

Sasaran pokok dalam arah pembangunan jangka panjang, yang menjadi catatan pokok yang harus diperhatikan adalah masih konservatifnya pemerintah dalam menetapkan target jumlah penduduk miskin di tanah air dan menyatakan “jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen” merupakan target yang menyiratkan masih belum adanya kesungguhan dan keberanian untuk menghapuskan atau paling tidak meminimumkan kemiskinan absolut di tanah air.

Berkaitan dengan struktur perekonomian yang kokoh, seharusnya lebih ditekankan lagi tentang sasaran untuk mengembangkan ekonomi rakyat yaitu melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional. Ekonomi (sebagian besar) rakyat Indonesia sejauh ini masih memberikan kontribusi relatif kecil dalam output nasional, demikian pula pangsa pasar yang dikuasainya. Namun demikian dari sisi jumlah pelakunya atau unit usaha serta penyerapan tenaga kerjanya, ternyata sangat dominan dibanding ekonomi usaha besar dan konglomerat.

Peran penting lain dari ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia, bisa dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja, karena bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja., sehingga bisa memecahkan masalah pengangguran.

PENUTUP

Dalam rangka menindaklanjuti tahap-tahap dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, agar dapat berjalan dan telaksana secara efektif, efisien, tepat manfaat dan tepat waktu, diperlukan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif dan terpadu. Arah kebijakan pembangunan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya bidang ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*), khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing.

Kebijakan pembangunan nasional memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi harus juga didukung oleh peran swasta dan masyarakat sebagai *stakeholders* pembangunan.

Akhirnya bahwa perencanaan pembangunan ekonomi memang harus direncanakan dengan baik dan matang supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan juga harus ada pengawasan yang lebih efektif lagi supaya tidak terjadi kebocoran yang merugikan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lincoln Arsyad. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Mubyarto. 2005. *Visi Indonesia 2028. Satu Abad Sumpah Pemuda*. Aditya Media Yogyakarta (Bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila/PUSTEP UGM). Yogyakarta.
- Djojonegoro, Wardiman. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Pembangunan*. Depdikbud. Jakarta.